

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Asian Games 1962: Kontestasi Politik Indonesia & Pembangunan Terhadap Dunia Melalui Ganefo

Asian Games Federation (AGF) dalam sidangnya sebelum upacara pembukaan Asian Games di Tokyo, memutuskan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah AG 1962 di Jakarta. Indonesia unggul tipis 22 – 20 atas Karachi, Pakistan lewat pemungutan suara (Pour, 2004 : 102). Kabar terpilihnya Indonesia menjadi kabar besar, Jakarta kala itu bisa dikatakan tidak punya apa-apa untuk bisa menyelenggarakan turnamen tersebut.

Pemerintah dinilai melakukan langkah yang kurang tepat, pasalnya Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, harga-harga di pasar tidak kunjung stabil. Surat kabar Pers Biro Indonesia (PIA) (dalam Anwar, 2006 : 91) menuliskan bahwa, “*Hujan dan harga-harga mahal serta kekurangan fasilitas-fasilitas tidak menghalangi warga ibu-kota merayakan penyambutan tahun baru 1962*”. Dari berita yang diterbitkan oleh PIA dapat dibayangkan kondisi perekonomian di Jakarta sedang tidak baik. Lesunya perekonomian di Jakarta sebagai pusat perekonomian di Indonesia tentu saja beruntun ke daerah-daerah di Indonesia. Pembebasan Irian Barat pada akhir tahun 1961, dianggap ada hubungannya dengan memburuknya kondisi perekonomian kala itu. Segala sesuatu menjadi dipusatkan pada pembebasan Irian Barat dan dilupakan bagaimana cara menyelesaikan masalah harga-harga yang melonjak. Tepung tidak ada, tempat-tempat pembuatan roti kacau karena tidak punya persediaan bahan baku, roti yang semula berharga 10 rupiah

menjadi 30 sampai 35 rupiah (Anwar, 2016 : 94). Selain itu terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 1962 juga dianggap akan semakin memperburuk keadaan, karena untuk membangun sarana infrastruktur tentu membutuhkan uang.

Walaupun kondisi Jakarta sedang demikian, Soekarno tetap mencanangkan Stadion Gelora Bung Karno. Empat desa digusur dan warganya direlokasi. Akan hal itu, Soekarno menuai banyak kecaman karena warga telah lama menetap di sana, relokasi dianggap memerlukan adaptasi, baik ekonomi maupun sosial. Walaupun demikian hal ini tidak mengurungkan ataupun merubah keputusan Soekarno yang tetap mencanangkan beberapa *venue* penunjang berlangsungnya Asian Games, Hotel Indonesia menjadi gerbang pembuka pembangunan yang disebut dengan istilah ‘Proyek Mercusuar’, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Stadion Utama Gelora Bung Karno dan infrastruktur lainnya. Soekarno menjawab tentangan-tentangan itu, menurutnya, manusia tidak hanya hidup untuk makan. Meski gang-gang di Jakarta penuh lumpur dan jalan masih kurang, dia memutuskan untuk membangun gedung-gedung bertingkat, jembatan berbentuk daun emanggi, dan sebuah jalan raya “*superhighway*”, *Jakarta Bypass*, kemudian menamai jalan-jalan dengan nama pahlawan-pahlawan; Jalan Diponegoro, Jalan Thamrin, Jalan Cokroaminoto. Soekarno menganggap pengeluaran uang untuk simbol-simbol penting seperti demikian tidak akan sia-sia. Tujuannya adalah untuk mengembalikan harga diri dan membuat bangsa Indonesia bangga dengan dirinya sendiri dalam Soekarno (dalam Adams, 2014 : 354). Keterbatasan dalam segi pendanaan tidak menjadikan Soekarno mundur, bahkan dengan kemampuan berpolitiknya Soekarno sukses melobi Nikita Khrushchev. Uni Soviet membantu memberikan kredit sebesar 12,5 juta US Dollar untuk modal pembangunan sarana Asian Games 1962 (Pour, 2004 : 102).

Asian Games 1962 juga diwarnai dengan penolakan, ketika dengan tegas menolak keikutsertaan dua Negara yang dinilai tidak dapat diterima secara politis. John Nauright (2012 : 223) menyebutkan bahwa, Soekarno menolak kedatangan Israel dan Taiwan untuk datang ke Indonesia. Padahal dua negara yang terdaftar sebagai anggota resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga anggota resmi IOC. Penolakan presiden Soekarno terhadap keikutsertaan Israel didasari dari rasa solidaritas dan perlawanan terhadap bentuk penindasan dan ekspansi Israel terhadap Palestina dan Negara Arab lainnya. Sebaliknya Soekarno malah mengundang Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara untuk ikut serta dalam Asian Games, padahal status dua Negara ini tidak tergabung dalam IOC. Konsekuensinya jelas, IOC marah, Indonesia kelak diskors dari Olimpiade Tokyo 1964, Indonesia balik melawan, dengan menyatakan keluar dari IOC.

Asian Games Indonesia yang dipimpin Soekarno, dengan segala pro-kontranya seakan megegaskan bahwa, Indonesia bukan Negara boneka yang dapat diatur oleh bangsa manapun, jati diri bangsa Indonesia yang besar dan menolak penjajahan ditegaskan pada momen ini. Pada sebuah kunjungan ke Amerika Serikat tahun 1956 Soekarno mengatakan bahwa, Asia sedang dalam *euforia* kemerdekaan (Adams, 2014 : 336). Hingga momentum AG Soekarno menjaga semangat itu dan menegaskan kepada IOC yang bemarkas di Swiss dan seakan mengatakan bahwa Asia adalah kekuatan baru di dunia dan Indonesia adalah representasinya.

Indonesia tidak hanya keluar dari IOC, tetapi juga membentuk olimpiade tandingan yang diberi nama Ganefo. Indonesia bergerak serius dan cepat untuk menyiapkan turnamen tandingan Olimpiade itu. Kepercayaan diri Presiden Soekarno dan menteri olahraga Maladi mencetuskan Ganefo untuk menentang IOC menjadi berlipat ganda tentu ada hubungannya dengan kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah, serta secara kualitas atlet

Indonesia tergolong mumpuni setelah menempati papan atas (posisi kedua) dalam turnamen tersebut. Dahlan (2016 : 29) menuliskan bahwa, Ganefo merupakan turnamen yang dicetuskan oleh presiden Soekarno sebagai pernyataan politik dunia dan bentuk penentangan atas IOC atau badan yang membawahi olimpiade antarbangsa. Presiden Soekarno menentang IOC karna sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa “*sport are sport! Do not mix sport with politics.*”, atau “olahraga adalah olahraga! Jangan disatukan dengan politik”. Presiden Soekarno tidak menentang pernyataan IOC itu dan balik membuat pernyataan bahwa olahraga harus dipisahkan dengan politik, menurut Soekarno, olahraga adalah politik seperti apa yang terwujud dalam Asian Games 1962 yang lalu. Olahraga juga merupakan sarana diplomasi antarbangsa dan Negara-negara yang ikut serta.

Asian Games 1962 dan Ganefo 1963 yang dinilai terlalu politis dan tidak mementingkan rakyat justru mewariskan pondasi pembangunan untuk rakyat Indonesia. Berkat Asian Games perencanaan pembangunan dipercepat, stasiun televisi Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan radio Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi awal mula berdirinya demokrasi media di Indonesia, serta Gelora Bung Karno sebagai warisan yang menjadi pusat olahraga.

B. Asian Games 2018: Antara Politik Olahraga dan Ekonomi

Tahun 2018 Asia telah menggelar Asian Games edisi ke-18, dan Indonesia untuk kedua kalinya kembali terpilih menjadi tuan rumah. Perbedaan pada turnamen 1962, kali ini Indonesia menggunakan dua *vanue* di dua kota berbeda, yaitu di Jakarta dan Palembang. Kali ini Sumatera Selatan (Sumsel) ikut menjadi bagian dari *vanue* dalam turnamen tersebut, Sumsel dinilai sebagai daerah paling siap untuk menjadi *vanue* Asian Games karena propinsi ini mempunyai Jakabaring *Sport City* (JSC).

JSC bukanlah tempat baru untuk menghelat *event* olahraga, Rahim Sazli Abdul (2016 : 4) memperjelas bahwa Sumsel sebagai *co-host* telah memiliki 18 *vanue* olahraga di JSC yang berstandar internasional dan telah teruji pada perhelatan olahraga, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), Southeast Asian Games (SEA) Games, Islamic Solidarity Games, dan Asean University Games. Stadion Jakabaring juga merupakan markas tim sepakbola Sriwijaya Football Club (FC) yang notabennya merupakan satu-satunya tim sepakbola di Sumsel yang berlaga di kompetisi tertinggi liga sepakbola Indonesia (Liga 1).

Perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia tidak hanya berdampak bagi ranah olahraga nasional saja, tetapi sektor-sektor yang lain juga terkena dampak dari perhelatan tersebut. Dampak yang diterima tentu saja dampak yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Membahas tentang olahraga dan ekonomi, Mutohir (2003 : 59) berpendapat bahwa, Olimpiade Los Angeles 1984 merupakan perhelatan olahraga modern yang menghubungkan sektor olahraga dan sektor ekonomi dengan menggunakan logika ekonomi bernama *sport business*. Semenjak Olimpiade 1984 mulailah terjalin hubungan yang erat antara olahraga dan industri. Olimpiade 1984 meraup keuntungan sebesar 227,7 juta US Dollar. Hal tersebut merupakan bukti bahwa jika olahraga dikelola dengan professional maka akan mendatangkan dampak ekonomi di samping nonekonomi.

Kepala Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ BAPPENAS), Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa, Asian Games memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia sebagai tuan rumah turnamen ini. Dampak ekonomi yang didapat Indonesia antara lain adalah, meningkatnya sektor pariwisata, meningkatnya aktivitas ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pengembangan kota melalui pembangunan infrastruktur fasilitas

olahraga. PPN/ BAPPENAS juga membagi dampak ekonomi menjadi dua kelompok, yaitu dampak ekonomi langsung dan tidak langsung. Dampak ekonomi langsung adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan pada saat persiapan, sedang berlangsung, dan setelah acara berlangsung. Dampak ekonomi untuk DKI Jakarta mencapai 22 triliun rupiah. Pengunjung DKI Jakarta diperkirakan bertambah hingga 408.400 orang, yang terdiri dari 154.069 wisatawan mancanegara dan 254.332 wisatawan lokal. Untuk Sumatera Selatan ekonomi langsung mencapai 18,5 triliyun rupiah, pengunjung Palembang diperkirakan bertambah hingga 175.029 orang, yang terdiri dari 66.029 wisatawan mancanegara dan 108.999 wisatawan lokal.

Sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak lanjutan yang kemudian akan mendorong pertumbuhan perekonomian antara lain, meliputi tahap konstruksi, operasional penyelenggaraan, dan kedatangan pengunjung, peningkatan output sektor, dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan tersebut akan berdampak pada sektor pariwisata yang ditunjang oleh sektor hotel, transportasi, serta kuliner dan penyiaran (BAPPENAS, Aian Games 2018 Akan Memberikan Dampak Positif Bagi Perekonomian Indonesia, 2018).

Asian Games bukan hanya sekedar perhelatan olahraga, tetapi lebih dari itu, Asian Games merupakan sebuah ajang promosi bagi Indonesia. Pawai obor Asian Games 2018 yang digelar melintasi daerah wisata seperti, Danau Toba, Bukit Tinggi, Gilimanuk, Banyuwangi, Tanjung Bira dan Raja Ampat dirancang untuk mempromosikan potensi wisata di Indonesia.

Selain itu, Asian Games juga akan memberikan warisan-warisan bagi Indonesia. Ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc) Erick Thohir (dalam Mediakuangan, Agustus 2018 : 24) mengatakan bahwa, ada beberapa warisan yang dimiliki Indonesia pasca

Asian Games 2018, diantaranya adalah ruang publik yang lebih tertata dengan rapi. Di samping itu juga warisan berupa model manusia yang lebih baik, karena kurang lebih 15 ribu relawan Asian Games berusia di bawah 30 tahun diharapkan dapat membawa kebiasaan disiplin pada kehidupan sehari-hari

Terlepas dari tujuan awal diselenggarakannya Asian Games 1962 dan Asian Games 2018, terdapat perbedaan dampak yang dihasilkan dari dua waktu berbeda tersebut. Asian Games 2018 tidak lagi berbicara tentang komitmen politik dengan negara lain. Secara politis Indonesia tidak lagi mengalami intervensi pola pemerintahan dan politis. Walaupun pada Asian Games 1962 tidak ada intervensi secara langsung dan terang-terangan pada pemerintah Indonesia kala itu, tetapi dapat terlihat secara jelas paham ideologi dan politik Soekarno terhadap negara lain mempengaruhi bentuk Asian Games kala itu. Berbeda dengan Asian Games 2018, dapat dilihat Indonesia tidak terpengaruh dengan paham politik dan ideologi dari dan terhadap negara lain, tetapi secara ideologis pesan yang disampaikan oleh Indonesia tidak sekuat dan sejelas apa yang terjadi pada 1962.

Meski demikian Asian Games 2018 tetap memiliki dampak untuk beberapa sektor. Dampak ekonomi seperti yang telah dilaporkan oleh BAPPENAS menjadi dampak nyata yang dihasilkan dari perhelatan Asian Games 2018. Dampak bagi ekonomi inilah yang kemudian menunjang dan memicu pertumbuhan di sektor-sektor lain, seperti, sektor investasi dalam bidang olahraga lewat pembangunan dan renovasi stadion Gelora Bung Karno, Gelora Jakabaring, wisma atlet, serta pembangunan *Light Rapid Transit* (LRT). Pembangunan LRT bukan hanya berperan pada investasi sektor transportasi tetapi juga mengantarkan kepada sektor perdagangan dan juga pariwisata. Sektor transportasi, perdagangan dan pariwisata merupakan sektor-sektor yang saling berhubungan, karena jika salah satunya putus maka jalur distribusi kepada dua jalur yang lain akan terganggu.